

Pembaruan dan Liberalisasi di Cina

Endi RUKMO

Dewasa ini pembaruan sedang berlangsung di Cina. Seperti halnya di negara sosialis lainnya, pembaruan itu terjadi karena pengalaman kegagalan di masa lalu. Para pemimpin Cina mengatakan bahwa hal itu bukannya pembaruan, tetapi suatu rektifikasi atau penyesuaian. Beriringan dengan gejolak politik yang terjadi, pembaruan itu selalu ditempuh oleh kelompok yang pada waktu itu berhasil mendominasi pengambilan keputusan di dalam partai. Oleh karena itu motivasi pembaruannya pun berbeda satu sama lain. Masing-masing kelompok menganggap kelompok lain telah melakukan kesalahan dan harus dibetulkan. Meskipun demikian tampaknya terdapat kesepakatan di antara mereka bahwa sosialisme harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi Cina.

Tulisan ini mencoba meninjau perkembangan negara ini sejak Partai Komunis Cina (PKC) berkuasa tahun 1949. Dari perkembangan itu akan tampak kapan pembaruan terjadi. Apakah hal itu hanyalah pembetulan atau memang suatu pembaruan?

LATAR BELAKANG DAN MOTIVASI

Setelah berhasil merebut dan menguasai Cina Daratan dari tangan kaum Nasionalis tahun 1949, PKC segera berupaya merombak struktur lembaga-lembaga pemerintahan sebelumnya dan menggantikannya dengan yang baru sesuai dengan sistem ideologi yang mereka anut. Kebijakan pertama yang mereka lakukan adalah *condong ke satu pihak* yaitu ke Uni Soviet. Dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan, persekutuan dan saling membantu di Moskwa bulan Februari 1950 antara Uni Soviet dan Cina, mengalirilah secara besar-besaran bantuan dari Moskwa ke Cina mulai dari barang-barang

Endi Rukmo adalah Staf CSIS.

modal sampai ke barang-barang konsumsi, penasihat politik, ekonomi dan militer, terlebih-lebih setelah Perang Korea meletus pada bulan Juni 1950 yang melibatkan negara itu secara langsung.

Sejalan dengan kebijakan di atas, Cina sepenuhnya mengikuti model pembangunan Soviet (Stalinis) dalam mengkonstruksi perekonomiannya, misalnya dengan menekankan pelaksanaan sistem pembangunan berencana, penekanan pada pengawasan sentral, kolektivisasi dan pembangunan industri berat. Kebijakan ini dilaksanakan dalam Repelita I yang berlangsung dari tahun 1953 sampai tahun 1957. Sejak awal Repelita I itu Pemerintah Cina melakukan nasionalisasi hak milik dan perusahaan swasta. Pada tahun 1956 sebagian alat produksi berhasil dikuasai negara dan pada tahun 1957 sudah sekitar 9.300 perusahaan dinasionalisir.¹

Pada musim dingin tahun 1955-1956 pemerintah melaksanakan sistem kolektif di bidang pertanian. Penduduk desa diorganisir dan dikelompokkan menjadi 100-300 keluarga. Setiap keluarga hanya diperbolehkan menyisihkan rata-rata 5% dari tanah mereka untuk tempat tinggal dan 95% lainnya harus diserahkan kepada negara. Tampak di sini bahwa Pemerintah Cina ingin mempercepat konsolidasi kekuatan politik di samping mempercepat proses sosialisasi di bidang pertanian. Tetapi pada tahun 1957 sistem ini gagal antara lain karena tidak terdapatnya tenaga kader yang mampu memimpinya.

Renggangnya hubungan Cina-Soviet terutama sejak Kongres Partai Komunis Uni Soviet XX bulan Februari 1956, di mana Khrushchev melontarkan kebijakan de-Stalinisasi, sangat mempengaruhi program pembangunan di Cina. De-Stalinisasi itu sendiri sebenarnya tidak ditujukan ke Cina. Meskipun demikian Mao Zedong yang pada dasarnya Stalinis sangat terpukul dan kedudukannya sebagai ketua partai mulai goncang.² Hal itu disebabkan oleh pro dan kontra de-Stalinisasi yang terjadi di kalangan para pemimpin Cina, yang merupakan awal perpecahan dan pengelompokan di kalangan pemimpin Cina yang memuncak pada saat Revolusi Kebudayaan meletus tahun 1967. Dalam proses itu mereka yang menentang Mao Zedong dibersihkan. Oleh Mao mereka dituduh telah terpengaruh gerakan de-Stalinisasi di Uni Soviet.

Untuk mencari dukungan dan memperkuat kedudukannya, Mao Zedong dengan memanfaatkan organ propaganda partai melancarkan kampanye "biarkan seratus bunga berkembang." Sasarannya adalah menarik kaum intelektual yang pada waktu itu mulai melancarkan kritik-kritik terhadap usaha sosialisasi PKC dan merangkul kembali kelompok dalam partai yang menentangnya. Tampaknya usahanya ini gagal. Hal itu terungkap dari hasil Kongres

¹Edward K. Sah, "Historical Background to Peking's Economic Structural Reforms and the Corresponding Changes in Economic Theory," *Issues & Studies* (Juni 1985): hal. 13.

²Frans Michael, "Sino-Soviet Relations," dalam *China: A Handbook*, ed., Yuan-li Wu (New York: Praeger Publisher, 1973), hal. 327.

PKC VIII bulan September 1956 yang memutuskan untuk menghapus semua yang berkenaan dengan Mao Zedong dan pemikirannya. Di samping itu ia juga dicopot dari jabatan Ketua Sekretariat Partai. Kemudian Kongres mengangkat Deng Xiaoping menjadi Sekjen Komite Sentral.³ Sejak itu kekuasaan Mao Zedong dibatasi. Meskipun ia tetap dihormati sebagai pemimpin tertinggi secara informal, dalam struktur partai, khususnya sejak tahun 1959, kedudukannya sebagai ketua partai digantikan oleh Liu Shaoqi. Banyak pengamat mengatakan bahwa periode setelah Kongres PKC VIII itu adalah periode kepemimpinan kolektif pertama di Cina.⁴

Tetapi berkat pengalaman yang cukup banyak dalam memimpin revolusi dan namanya yang tetap disegani, Mao Zedong bisa mempertahankan kepopulerannya. Meskipun hanya menjabat Ketua Kehormatan Komite Sentral ia tetap berpengaruh dalam lingkungan pengambilan keputusan. Hal itu terungkap dari andil besarnya dalam menyusun Repelita II.

Dalam penyusunan Repelita II itu terjadi suatu kesepakatan antara pimpinan puncak. Meskipun penekanan sepenuhnya pada industri berat dapat dikatakan berhasil baik, investasi besar-besaran di bidang itu telah mengorbankan pembangunan di bidang pertanian dan menambah beban hutang. Sekitar separuh dari investasi di bidang industri berat adalah bantuan Soviet yang digunakan untuk membangun 156 proyek besar di Wuhan atau Paotow di Cina Utara, yang harus dikembalikan karena bantuan itu bukannya hibah, melainkan pinjaman bersyarat lunak.⁵ Faktor inilah yang membawa kesepakatan para pengambil keputusan dalam Kongres VIII PKC untuk meninjau kembali strategi pembangunan yang sepenuhnya berusaha menerapkan model pembangunan Soviet itu. Mereka kemudian sepakat untuk memodifikasi model pembangunan tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi-kondisi Cina. Faktor lain yang mempengaruhi ditinjaunya kembali strategi pembangunan itu adalah kecenderungan menurunnya bantuan Soviet dengan dicopotnya Malenkov dari kepemimpinan Soviet bulan Juni 1957.⁶

Faktor-faktor di atas mendorong Mao Zedong melontarkan ambisinya untuk menciptakan model pembangunan ekonomi yang sosialis ala Cina (Mao). Setelah dengan keahliannya berhasil kembali mendominasi kekuatan dalam partai, Mao Zedong mengusulkan suatu program pembangunan

³Harold C. Hinton, *An Introduction to Chinese Politics* (New Town Abbot: David & Charles, 1973), hal. 35.

⁴Michael, "Sino-Soviet Relations," hal. 328.

⁵Repelita Pertama telah menginvestasikan sekitar 25 milyar Yuan (pada tahun 1952 1 US\$ = 2,343 Yuan) dan separuhnya adalah bantuan bersyarat lunak dari Uni Soviet. Lihat John King Fairbank, *The Great Chinese Revolution 1800-1985* (New York: Harper & Row Publishers, 1986), hal. 286.

⁶Hinton, *Introduction*, hal. 38-39.

ekonomi yang lebih radikal yaitu menggabungkan pembangunan industri berat yang dianggapnya telah berhasil dan oleh karenanya harus diteruskan, dengan pembangunan industri ringan dan kecil di pedesaan yang bersumber pada produk-produk pertanian. Agar sosialisasi perindustrian bisa dipercepat pelaksanaannya, maka rakyat pedesaan disatukan dalam komune-komune, suatu sistem yang jauh lebih ambisius dari sistem kolektif. Usulan Mao ini dinyatakan dalam pidatonya pada sidang Kongres Rakyat Nasional bulan Februari 1958 dan secara resmi dinyatakan mulai dilaksanakan dalam pidato Liu Shaoqi pada sidang kedua Kongres PKC VIII bulan September 1956.⁷

Program yang ambisius ini terkenal dengan sebutan *Lompatan Besar ke Depan*. Sejak itu 170 juta keluarga petani diorganisir ke dalam 54.000 komune, yang masing-masing terdiri atas rata-rata 13 brigade produksi, 108 tim produksi, 3.400 keluarga yang beranggotakan sekitar 16.000 orang.⁸ Ide komune ini berasal dari tradisi kuno di Cina. Sejak lama penguasa Cina telah mengorganisir kegiatan petani di desa. Mereka dikelompokkan, yang pada awal perkembangannya hanya ke dalam lima sampai sepuluh keluarga setiap kelompok, tetapi kemudian berkembang menjadi 1.000 keluarga setiap kelompoknya. Sistem ini disebut *paochia*, yaitu sistem tanggungjawab bersama di pemerintahan lokal yang bertujuan mengontrol pemungutan pajak dan loyalitas rakyat terhadap penguasa.⁹ Mao melihat tradisi ini cocok untuk mempercepat sosialisasi pembangunan industri dan rakyat Cina. Karena berasal dari tradisi Cina sendiri, ide Mao itu segera mendapat dukungan dari semua pihak.

Bagi Mao Zedong penerimaan gagasannya itu merupakan kemenangan tersendiri. Dengan Lompatan Besar ke Depan itu ia ingin menunjukkan kepada dunia, khususnya Uni Soviet, bahwa dia tidak dapat lagi didikte. Di samping itu melalui gagasan itu Mao berambisi menjadikan Cina suatu negara sosialis yang kuat sehingga dapat menyaingi negara-negara besar kapitalis seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di depan Konferensi Dewan Negara Tertinggi bulan September 1958 Mao Zedong mengatakan:

Pada awal pembebasan di tahun 1949, Cina hanya mampu memproduksi 8.000 mesin bubut. Itu pun hanyalah tipe mesin yang sangat sederhana ... Sembilan tahun terakhir ini kita telah memproduksi 180.000 mesin bubut ... Jika kita sekarang mulai bekerja giat, beberapa tahun lagi kita akan dapat melipatgandakan produksi mesin tersebut. Pada saat itu, apabila kita mengadakan perundingan dengan Amerika Serikat, posisi kita sudah cukup kuat.¹⁰

⁷*Ibid.*, hal. 40.

⁸Chu-yuan Cheng, "Economic Reform in Mainland China: Consequences and Prospects," *Issues & Studies* (Desember 1986): hal. 15.

⁹Fairbank, *The Great Chinese Revolution*, hal. 297.

¹⁰Alan P.L. Llu, "How Can We Evaluate Communist China's Political System Performance?" *Issues & Studies* (Februari 1987): hal. 119.

Pada tahun 1961 ia juga pernah mengatakan bahwa Cina harus bisa dikenal sebagai negara industri-agraris. Jika Cina ingin mengungguli Inggris dalam produksi bajanya, maka Cina harus mampu meningkatkan produksinya sampai 350 juta ton.¹¹

Dari alasan-alasan yang dikemukakan Mao di atas tampak bahwa program pembangunan perindustrian Cina itu bukannya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, tetapi lebih pada mempercepat perombakan sistem (dari sistem kapitalis ke sistem sosialis) dan menyaingi negara besar lain yang dianggap musuh-musuhnya. Pernyataan Mao pada tahun 1961 itu, misalnya, menunjukkan tegarnya ambisi Mao meskipun dia tahu bahwa Lompatan Besar ke Depan telah gagal. Bahkan program yang sangat ambisius itu telah memakan korban sekitar 30 juta orang.¹² Sebagian besar dari mereka ini meninggal karena tidak kuat menanggung beban berat yang harus dipikul dalam pelaksanaan program Mao yang ambisius itu dan di bawah pengawasan yang begitu ketat dari PKC. Beban mereka bertambah berat dengan datangnya musim kering yang panjang, yang akhirnya mengakibatkan bencana kelaparan. Bencana ini menjadi semakin parah karena penduduk pedesaan yang telah diorganisir ke dalam komune-komune itu diharuskan memenuhi produksi yang ditargetkan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan perindustrian dan pembayaran hutang ke Uni Soviet, sehingga jatah makan mereka dikurangi. Oleh karenanya program Lompatan Besar ke Depan itu pada tahun 1960 dihentikan dan dianggap gagal.

Kegagalan program itu mengakibatkan bangkitnya kembali perpecahan di dalam PKC. Masing-masing kelompok mencoba menganalisa kegagalan Repelita II dan mengeluarkan kesimpulannya sendiri. Kelompok Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping, misalnya, menyatakan bahwa perlu dilakukan penyesuaian segera dengan melihat fakta yang ada di Cina. Kelompok ini mendukung gagasan "tanggungjawab individu" yang akan dapat meningkatkan rangsangan bagi produksi pertanian. Tetapi pendapat kelompok ini ditentang oleh Mao Zedong dan Lin Biao yang mengatakan bahwa gagasan itu hanya akan menciptakan pergolakan kelas. Kedua pemimpin ini tetap gandrung pada percepatan sosialisasi dengan pengerahan penduduk pedesaan.

Pertentangan antara kedua kelompok itu semakin tajam dengan dukungan Soviet pada Liu Shaoqi dan kawan-kawan, dan sebagai akibatnya Menteri Pertahanan Marsekal Peng Dehuai dan Kepala Staf Huang Koqeng yang sangat pro-Soviet dipecat dari jabatan mereka pada Sidang Pleno Komite Sentral tanggal 1-16 Agustus 1959. Kedudukannya digantikan oleh Marsekal Lin Biao. Kejadian ini memperburuk hubungan antara Cina dan Uni Soviet, dan berakibat dihentikannya semua bantuan Soviet ke Cina pada tahun 1960 ter-

¹¹*Ibid.*

¹²Fairbank, *The Great Chinese Revolution*, hal. 296.

masuk ditariknya kembali 1.390 teknisi Soviet yang bekerja di negara itu.¹³ Dengan ditariknya bantuan itu lengkaplah kegagalan Repelita II yang akhirnya dihentikan pada tahun itu juga atau satu tahun lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

PERIODE PENGATURAN KEMBALI DAN REVOLUSI KEBUDAYAAN

Kegagalan program Lompatan Besar ke Depan rupanya memperkuat posisi kelompok Liu Shaoqi. Pada pertemuan Komite Sentral bulan Januari 1961, kelompok ini berhasil menghidupkan kembali kantor-kantor cabang Komite Sentral di daerah yang telah dihapuskan pada tahun 1954, dan menempatkan orang-orangnya di sana. Keberhasilannya ini dimungkinkan karena Sekretariat Partai pada waktu itu diketuai oleh Deng Xiaoping. Dengan demikian pengaruh kelompok ini pada pengaturan kembali program pembangunan perekonomian semakin besar.

Kurangnya perhatian pada sektor pertanian selama Repelita II merupakan salah satu sebab kegagalan meningkatkan produksi pertanian. Salah satunya adalah penghapusan insentif pada sistem komune yang dilancarkan selama periode itu. Kesalahan itu agaknya yang menjadi perhatian kelompok Liu Shaoqi. Untuk memperbaikinya mereka berhasil menghidupkan kembali sistem insentif itu dan mengendorkan pengawasan terhadap kehidupan petani. Sistem komune tidak dihapus tetapi diperkecil satuannya sehingga jumlahnya bertambah besar. Pada tahun 1963 jumlah komune meningkat menjadi sekitar 74.000.¹⁴ Di samping itu setiap komune pada masa itu lebih diberi kebebasan untuk membuat keputusan sendiri (desentralisasi).

Usaha swasta kecil-kecilan di bidang penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan mulai diijinkan di samping kewajiban mengembangkan dan meningkatkan produksi komune. Hasil-hasil pertanian dari usaha swasta yang bisa dijual di pasar "bebas" itu merupakan rangsangan para petani untuk berlomba meningkatkan produksi mereka. Sebaliknya program industrialisasi yang menjadi sasaran utama pada Repelita II dikurangi dan menjadi prioritas nomor dua. Usaha-usaha itu segera menghasilkan buah. Meskipun terjadi cuaca buruk di tahun 1961, produksi pertanian dapat ditingkatkan.

Pada suatu pertemuan Komite Sentral PKC bulan September 1962 usaha-usaha kelompok Liu itu mendapat kritikan dari Mao Zedong yang tampaknya berhasil kembali mendominasi pertemuan itu. Bahkan usulannya untuk melancarkan suatu "kampanye pendidikan sosialis" diterima. Dengan dalih membersihkan unsur-unsur revisionis, Mao Zedong melancarkan kampanye

¹³Hinton, *Introduction*, hal. 48.

¹⁴*Ibid.*, hal. 49.

pembersihan orang-orang yang menentanginya. Dukungan para kader muda di dalam PKC dan Lin Biao di TPR (Tentara Pembebasan Rakyat) mendorong Mao untuk mempercepat pembersihan kelompok penentang baik di pemerintahan, partai maupun TPR.

Usaha Mao itu baru membawa hasil setelah berjuang selama tiga tahun (1962-1965). Pada pertemuan Komite Tetap Politbiro bulan September-Oktober 1965 Mao Zedong dan Lin Biao mendesak pertemuan agar segera dilancarkan suatu kampanye pemikiran borjuis yang reaksioner di dalam partai dan kembali kepada prinsip-prinsip dasar gerakan revolusi. Kampanye ini berhasil memikat kaum muda dan dengan dukungan mereka ini Mao meningkatkan serangannya terhadap kecenderungan "Khrushchevian" di dalam partai. Pro dan kontra Mao di kalangan kaum muda meningkat menjadi kecauan sehingga pada bulan Juni 1966 semua sekolah ditutup. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kelompok Mao untuk meningkatkan kampanye mengangakat kembali pemikiran Mao dan menentang kelompok moderat. Para pelajar diorganisir ke dalam suatu organisasi politik yang terkenal dengan sebutan *Pengawal Merah*. Mereka ini segera menjadi pendukung Mao yang sangat fanatik. Tidak beberapa lama jumlah mereka sudah semakin membesar. Pada bulan November 1966 Pengawal Merah di Beijing sudah mencapai sekitar sepuluh juta orang. Kegiatan mereka segera pula menyebar ke kota-kota lain.

Melalui pawai-pawai besar dan poster-poster dinding, Pengawal Merah berkampanye untuk menghidupkan kembali pemujaan terhadap Mao Zedong dan pemikirannya. Mereka juga memusnahkan apa yang mereka namakan "empat musuh lama" yaitu paham lama, kebudayaan lama, adat-istiadat lama dan kebiasaan lama. Oleh karena itu masa ini dikenal sebagai masa *Revolusi Kebudayaan*.

Karena gerakan Pengawal Merah itu, permusuhan antara kelompok Mao dan kelompok moderat di bawah Liu Shaoqi berubah menjadi konflik terbuka. Tetapi revolusi kali ini rupanya didominasi oleh kelompok Mao, sehingga "kaum revisionis" atau pengikut Khrushchev di Cina yang tergabung dalam kelompok moderat semakin terdesak. Mereka ini pada akhirnya menjadi sasaran pembersihan, baik dari jabatan pemerintahan, partai maupun militer (TPR). Kecuali Zhou Enlai, semua pengikut kelompok ini ditangkap dan dipenjarakan.

Revolusi Kebudayaan ini mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi. Para pengikut Mao yang radikal itu lebih suka kalau pembangunan ekonomi ditunda, dan pembangunan politik digalakkan. Pemahaman akan norma-norma sosial kerakyatan yang menjadi dasar pemikiran Mao menjadi prioritas utama. Sebagai ganti mengikuti pelajaran di sekolah dan universitas, kepada pemuda yang tergabung dalam Pengawal Merah dibagikan "buku merah" berisi ajaran Mao Zedong untuk dipelajari, didiskusikan dan disebar-

luaskan. Untuk mengamalkan ajaran itu mereka dikirim ke pelosok-pelosok.

Gerakan Revolusi Kebudayaan ini memuncak pada bulan Januari 1967, ketika Komite Pusat GRK memerintahkan Pengawal Merah mengambil-alih kekuasaan partai. Mereka lalu bergerak ke seluruh kota di Cina dan menduduki kantor-kantor PKC dan mengusir para pejabat partai setempat. Gerakan ini menjadi kacau dan tak dapat dikendalikan sehingga akhirnya mengundang TPR untuk turun tangan. Tetapi kedatangan mereka itu terlambat karena semua infrastruktur pemerintahan dan partai sudah hancur. Tentara sendiri terpecah-belah akibat pro dan kontra pada Pengawal Merah yang diperintahkan Beijing untuk menangkap tentara yang dianggap mengikuti "jalan kapitalis," sehingga bentrokan fisik antara mereka tidak dapat dihindarkan. Karena kekacauan semakin tidak dapat diatasi, akhirnya sebagai Ketua Gerakan Revolusi Kebudayaan Mao Zedong memutuskan untuk membubarkan Pengawal Merah pada bulan Juli 1968 dengan alasan mereka gagal mengemban misi dan memerintahkan TPR untuk melaksanakan pembentukan Komite Revolusi di seluruh propinsi. Karena TPR yang disertai tugas, maka wajar kalau keanggotaan Komite Revolusi itu didominasi oleh kaum militer.¹⁵

Revolusi Kebudayaan yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk merintangi kelancaran pembangunan ekonomi, akhirnya toh mengakibatkan penurunan pendapatan terutama di sektor pertanian dan perindustrian. Revolusi ini juga mengakibatkan kehancuran struktur partai dan pemerintahan. Sistem komune otomatis terhenti. Oleh karena itu Kongres PKC IX yang berlangsung pada bulan April 1969 memutuskan untuk menghentikan revolusi tersebut.

Dominasi orang-orang militer dalam Komite Revolusi membuka peluang bagi Lin Biao untuk mencalonkan diri sebagai pengganti Mao Zedong. Namanya naik pesat setelah ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan berhasil membawa TPR ke era modern dengan suksesnya percobaan nuklir pertama tahun 1964 meskipun tanpa bantuan Uni Soviet. Percobaan ini diteruskan dan sampai bulan Mei 1966 Cina telah berhasil melakukan tiga percobaan. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebanggaan nasional rakyat Cina terutama dalam usaha menandingi Uni Soviet yang pada waktu itu sudah dianggap musuh nomor satunya. Ketenarannya ini memuncak setelah Revolusi Kebudayaan dinyatakan berhenti. Bahkan pada waktu itu dia dianggap sebagai pemimpin kedua Cina setelah Ketua Mao dan sebagai calon penggantinya pada Kongres PKC IX.

¹⁵William A. Joseph, "China's Modernization of Mao," *Current History* (September 1986): hal. 267.

MODERNISASI: GAGASAN DAN PELAKSANAAN

Semakin meningkatnya dominasi militer dan terutama pengaruh Lin Biao dalam TPR menyadarkan Mao Zedong dan Zhou Enlai yang tetap tidak tergeser dari jabatan Perdana Menteri meskipun semua rekannya terdepak ke luar, bahwa hal itu akan membahayakan kedudukan mereka. Maka pada awal tahun 1970-an dimulailah usaha-usaha untuk mendepak Lin Biao. Untuk itu Mao sendiri melakukan perjalanan ke daerah-daerah dan bertemu dengan para kepala daerah militer untuk memeriksa loyalitas mereka. Setelah terjadi usaha kudeta militer yang melibatkan anaknya, pada bulan September 1971 Lin Biao dan isterinya berusaha lari ke luar Cina, tetapi pesawat yang mereka tumpangi jatuh dan menewaskan semua penumpangnya.¹⁶

Meninggalnya Lin Biao itu membuka peluang kelompok moderat untuk tampil kembali. Tetapi hambatan yang mereka hadapi saat itu adalah kelompok Revolusi Kebudayaan binaan Ketua Mao Zedong terutama kelompok Revolusi Kebudayaan cabang Shanghai yang diketuai oleh istri Mao, Ny. Jiang Qing dan tiga rekannya (Yao Wanyuan, Wang Hungwen dan Zhang Chungqiao) yang kemudian dikenal sebagai "Empat Sekawan." Keempatnya ini berhasil dimasukkan Mao ke dalam keanggotaan Politbiro.

Sementara itu, Zhou Enlai berhasil mempengaruhi Mao untuk merehabilitasi teman seperjuangannya, Deng Xiaoping. Pada Kongres PKC X bulan Agustus 1973, Deng direhabilitasi dan kembali menjadi anggota Politbiro. Beberapa pengamat mengatakan bahwa rehabilitasi Deng itu untuk mengimbangi diangkatnya Wang Hungwen menjadi anggota badan tertinggi PKC itu.

Faktor senioritas dan kepandaiannya baik di bidang ekonomi maupun politik luar negeri membuat Zhou Enlai lebih populer dari Ny. Jiang Qing dan kawan-kawan, terlebih-lebih setelah Deng muncul kembali. Dengan dukungan Deng ini Zhou melontarkan kembali gagasannya tentang *modernisasi* (yang pernah ia nyatakan pada tahun 1964) dalam Kongres Majelis Rakyat Nasional IV bulan Januari 1975. Dikatakannya bahwa jika Cina ingin menjadi negara sosialis yang besar dan kuat di akhir abad ke-20, maka ia harus melaksanakan empat modernisasi yaitu modernisasi di bidang pertanian, perindustrian, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan. Sementara itu Deng pada kongres itu diangkat menjadi Wakil I Perdana Menteri, sehingga hanya dua tahun setelah direhabilitasi ia sudah berhasil menduduki peringkat ketiga sesudah Mao dan Zhou.

Meninggalnya Zhou Enlai bulan Januari 1976 merupakan tragedi kedua bagi Deng Xiaoping. Beberapa bulan setelah peristiwa itu untuk kedua kalinya

¹⁶Penyebab kematian Lin Biao sampai sekarang masih belum jelas. Ada yang mengatakan bahwa pesawat yang ditumpangnya ditembak jatuh. Tetapi ada pula sumber yang mengatakan bahwa di dalam pesawat itu tidak terdapat Lin Biao.

ia disingkirkan dari semua jabatannya. Ia dituduh bertanggungjawab atas pengerahan massa demonstran di Lapangan Tienanmen pada bulan April 1976 untuk menghormati meninggalnya Zhou Enlai. Hua Guofeng, anak didik Mao yang pada waktu itu menjabat Perdana Menteri, mendukung pemecatan itu. Bahkan pada rapat Politbiro tanggal 7 Oktober 1976, Hua masih menyerang dan mengkritik Deng seperti yang pernah dilontarkan oleh Empat Sekawan dan Mao Zedong.

Rupanya hanya karena desakan Zhou Enlai, Deng Xiaoping direhabilitasi. Pada dasarnya Mao dan kelompoknya tidak suka kepada tokoh yang pandai dan cukup berpengaruh ini. Oleh karena itu begitu Zhou meninggal, kelompok ini segera berusaha mendepak Deng keluar dari partai dan pemerintahan.

Pemecatan Deng ini tidak begitu saja diterima oleh para pengikut dan simpatikan kelompok moderat. Akibatnya timbullah konfrontasi terbuka di wilayah-wilayah yang menjadi basis kekuatan Deng Xiaoping. Mereka terus menuntut agar nama Deng Xiaoping direhabilitasi.¹⁷ Pergolakan antara kedua kelompok itu semakin memuncak, terlebih-lebih setelah meninggalnya Ketua Mao Zedong tanggal 9 September 1976. Hanya karena penengahan oleh tokoh militer kawakan Marsekal Ye Jianguo, Hua Guofeng tidak melanjutkan serangannya terhadap Deng Xiaoping dan bahkan kemudian pada Konperensi Kerja Komite Pusat PKC yang berlangsung bulan Maret 1977, disetujui suatu resolusi yang mendesak Deng untuk tampil kembali dalam kepemimpinan partai dengan satu syarat yaitu ia harus mengakui kesalahan-kesalahannya di masa lalu.

Hasil Konperensi Kerja Komite Pusat PKC itu dijadikan bahan pembahasan Sidang Pleno ke-3 Kongres Komite PKC X yang kemudian memutuskan untuk mengangkat Hua Guofeng menjadi Ketua Partai dan Ketua Komisi Militer Komite Pusat Partai dan Deng Xiaoping menjadi Wakil Ketua I PKC, Wakil Ketua Komisi Militer Komite Pusat, Wakil Perdana Menteri dan Ketua Staf Umum PLA. Di samping itu Sidang juga sepakat untuk menyatakan bahwa Empat Sekawan adalah musuh bersama. Oleh karenanya mereka dipecat untuk seterusnya dari PKC.¹⁸ Sejak itu pembersihan terhadap kelompok radikal dimulai, dan sebaliknya dominasi kelompok moderat di bawah pimpinan Deng Xiaoping terus meningkat.

Kongres PKC XI bulan September 1977 atau tepatnya Sidang ke-3 Komite Sentral Kongres PKC XI bulan Desember 1978 merupakan saat yang menentukan perkembangan Cina selanjutnya. Sejak Kongres XI dibahas menyeluruh baik mengenai kejadian sebelumnya maupun rencana strategi yang akan

¹⁷Lihat *Indonesia dan Dunia Internasional 1978* (Jakarta: CSIS, 1979), hal. 511.

¹⁸Warren Kuo, "The Political Power Structure in Mainland China," *Issues & Studies* (Juni 1978): hal. 23.

ditempuh. Sidang sepakat bahwa Pemerintah Cina telah melakukan kesalahan-kesalahan sejak Kongres PKC VIII bulan September 1956. Kesalahan terbesar adalah kebijakan Lompatan Besar ke Depan dan Revolusi Kebudayaan. Kesalahan-kesalahan itu mengakibatkan menurunnya secara drastis pertumbuhan perekonomian dan timbulnya pergolakan politik. Untuk itu sidang sepakat untuk mengadakan koreksi dan penyesuaian-penyesuaian.

Tahap pertama yang dilakukan oleh Deng Xiaoping adalah memantapkan posisinya dengan menarik anak didiknya, Hu Yaobang, ke dalam Politbiro dan diberi posisi ketua departemen organisasi partai pada Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral PKC itu. Bersama Hu, Deng Xiaoping mengusahakan pembaruan-pembaruan dan koreksi atas kebijakan pemerintah sebelumnya. Dominasi kelompok Deng ini semakin mantap dengan masuknya Zhao Ziyang ke dalam Politbiro pada Sidang Pleno ke-4 Kongres PKC XI bulan September 1979.¹⁹ Sementara itu usaha pembersihan sisa-sisa kelompok Revolusi Kebudayaan terus digalakkan. Dan akhirnya Hua Guofeng sendiri juga terdepak ke luar dari Politbiro dan pemerintahan Cina pada bulan September 1980. Semakin kuatnya posisi kelompok Deng ini segera dimanfaatkan untuk melaksanakan gagasan "Empat Modernisasi" seperti yang pernah dilontarkan oleh mendiang Zhou Enlai. Untuk itu Hu Yaobang disertai tugas membenahi urusan kepartaian dan Zhao Ziyang urusan pemerintahan menggantikan Hua Guofeng.

Sasaran empat modernisasi adalah menjadikan Cina suatu negara sosialis yang kuat dan modern di akhir abad ke-20 atau pada awal tahun 2000-an. Untuk itu pendapatan per kapita harus ditingkatkan empat kali lipat menjadi sekitar US\$1.000 dengan melalui peningkatan pertumbuhan produksi baik di sektor industri maupun pertanian rata-rata 7,2% per tahun. Di sektor perindustrian sasaran modernisasi adalah pembangunan 120 proyek besar termasuk 10 kelompok industri besi dan baja, 9 industri non-ferrus metal, 8 tambang batu bara, 10 tambang minyak dan gas, 30 pusat tenaga listrik, 6 jalur kereta api baru dan 5 pelabuhan.²⁰

Sementara itu di sektor pertanian prioritas utama adalah peningkatan kehidupan petani di pedesaan. Sasaran dan rencana pembangunan pertanian ini untuk pertama kalinya dinyatakan oleh Deng Xiaoping di depan Sidang ke-3 Komite Sentral PKC. Antara lain ia mengatakan bahwa prioritas utama pembangunan akan lebih ditujukan pada pembangunan pertanian. Suatu sistem baru akan diterapkan untuk menggantikan sistem lama. Inti sistem baru itu adalah tanggungjawab kontrak atas dasar keluarga dengan penggajian yang

¹⁹Michael Yahuda, "Recent History of PRC," *The Far East and Australasia 1986* (London: Europa Publication Ltd., 1987), hal. 295.

²⁰Kevin Rafferty, "China's Modernization Problems," *Asia and Pacific 1982* (London: World of Information, 1982), hal. 56.

disesuaikan dengan produktivitas. Sistem ini merupakan kebijakan yang tidak lagi mengharuskan keluarga petani bekerja bersama-sama dalam komune, melainkan menyewa tanah pada pemerintah untuk diusahakan sendiri dan langsung mendapatkan keuntungan.²¹ Dengan demikian sistem komune yang dilaksanakan sejak tahun 1958 dan yang sudah banyak menimbulkan korban itu dihentikan.

Meskipun demikian Pemerintah Cina menegaskan bahwa modernisasi itu tidak boleh menyimpang dari *Empat Prinsip Utama* yaitu mendukung sosialisme, PKC, kediktatoran proletar dan pandangan Marxis-Leninis dan Maois. Pernyataan seperti ini sering diucapkan oleh Deng Xiaoping sejak tahun 1977. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau jatuhnya Hu Yaobang pada awal tahun 1987 disebabkan oleh tuduhan bahwa ia telah mendorong penyimpangan dari empat prinsip tersebut. Sebagai orang yang bertanggungjawab atas kehidupan partai, ia seharusnya bekerja atas dasar empat prinsip itu. Tetapi justru sebaliknya ia mendukung demonstrasi mahasiswa yang berlangsung dari awal Desember 1986 sampai pertengahan Januari 1987 dan menuntut liberalisasi yang lebih luas yang oleh rezim Beijing disebut sebagai "liberalisme borjuis." Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan modernisasi yang sedang berlangsung di Cina itu tetap akan dipertahankan dalam kerangka pembangunan sosialisme.

DAMPAK, HAMBATAN DAN PROSPEK

Kebijakan yang dilontarkan sejak Kongres PKC XI itu banyak membawa dampak baik pada kehidupan rakyat di pedesaan, manajemen perindustrian maupun kehidupan politik. Sejak awal pemerintah memang telah menegaskan bahwa modernisasi itu tetap harus di dalam kerangka sosialisme (ortodoks). Tetapi kenyataannya terjadi pembaruan di beberapa sektor. Sebagai contoh terjadinya pembaruan di sektor pertanian pedesaan. Di dalam sistem baru cara kuota mulai diterapkan. Para petani diwajibkan memenuhi jatah produksi yang akan dibeli oleh pemerintah (90% dari hasil panen) dan sisanya boleh dijual di pasar (bebas terpimpin). Untuk mendukung sistem pasar ini pemerintah mengizinkan kembali usaha-usaha swasta. Hal ini bertolak belakang dengan Pemerintah Cina tahun 1957 yang berusaha membasmi usaha swasta dan menasionalisasi sekitar 9 juta perusahaan swasta.

Sistem baru ini membawa dampak positif dalam kehidupan rakyat di pedesaan. Sejak tahun 1979 hasil pertanian naik rata-rata (berdasarkan harga konstan tahun 1980) 6,5% per tahun.²² Sementara itu jumlah usaha swasta

²¹*Suara Karya*, 3 Januari 1985.

²²*Far Eastern Economic Review*, "China '82," 1-7 Oktober 1982: hal. 49.

yang tahun 1978 hanya tinggal sekitar 150.000, pada tahun 1979 meningkat menjadi 810.000 dan pada tahun 1982 menjadi 1.470.000 buah.²³ Di samping itu perekonomian pedesaan bergerak menuju spesialisasi dan dengan sistem insentif itu para petani berlomba meningkatkan produksi mereka dengan harapan agar sisa hasil yang harus dijual kepada pemerintah meningkat. Dengan demikian mereka dapat menjual lebih banyak hasil di pasar bebas.

Pembaruan di sektor pertanian itu dijadikan eksperimen oleh pemerintah untuk perbaikan-perbaikan kehidupan rakyat selanjutnya. Salah satu pelajaran yang diperoleh oleh para pemimpin Cina adalah bahwa monopoli pemerintah merupakan hambatan kemajuan. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan (Januari 1982) untuk menghapuskan pembelian secara monopoli hasil panen para petani. Meskipun tidak dikatakan secara jelas, dapat disimpulkan bahwa keputusan itu membuat para petani bebas memperdagangkan hasil panen mereka. Keputusan itu diikuti oleh keputusan di bidang lain. Misalnya, dengan dihapuskannya sistem komune rakyat dan brigade produksi, pemerintah membentuk pemerintahan kotapraja dan komite penduduk desa. Sejak bulan Oktober 1983, telah dibentuk 75.870 pemerintah kotapraja dan 700.000 komite penduduk desa.

Pembaruan di bidang pertanian itu diikuti oleh pembaruan di sektor industri. Tetapi pembaruan di sektor ini pada mulanya mengalami hambatan dengan sangat terbatasnya dana dan terlalu ambisiusnya target yang akan dicapai. Oleh karena itu Kongres Partai Komunis Cina XII yang berlangsung sejak bulan September 1982 mulai mengadakan koreksi-koreksi dan penyesuaian laju pembangunan dengan kenyataan yang ada. Koreksi pertama yang dilakukan adalah penundaan pembangunan di beberapa sektor industri berat dan meningkatkan pembangunan industri ringan, yang lebih banyak hubungannya dengan sektor pertanian.

Pada Sidang lengkap ke-3 Komite Sentral Kongres PKC XII tanggal 20 Oktober 1984, Deng Xiaoping menyampaikan suatu keputusan pembaruan struktur perekonomian. Keputusan ini tampaknya sama pentingnya dengan keputusan pembaruan di sektor pertanian yang telah disampaikan pada Sidang ke-3 Komite Sentral Kongres PKC XI tahun 1978. Keputusan ini juga dapat dikatakan sebagai langkah selanjutnya dari usaha Pemerintah Cina dalam mengadakan pembaruan di bidang ekonomi. Bila dilihat isinya, keputusan ini menekankan pembaruan di bidang kehidupan perusahaan. Meskipun pada dasarnya Pemerintah Cina tetap menekankan superioritas sosialisme, nyatanya pada keputusan yang baru ini teori kapitalisme mulai diterapkan.

²³Chao Yin-shen, "Expansion on Individual Economy on the Chinese Mainland," *Issues & Studies* (April 1984): hal. 5-8.

Tiga hal penting perlu dicatat dari pernyataan Deng Xiaoping tersebut. *Pertama*, usaha pemerintah untuk menjadikan penyegaran badan usaha sebagai kunci penyusunan kembali perekonomian nasional. Pemerintah menyadari bahwa struktur perekonomian Cina lemah karena kurangnya vitalitas perusahaan-perusahaan yang disebabkan oleh pengawasan ketat dari negara (partai). Untuk mengatasinya, pemerintah, melalui keputusan itu, menetapkan bahwa atas dasar kebijaksanaan pemerintah dan ketaatan kepada pengawasan pemerintah, setiap perusahaan diijinkan untuk menentukan kebijaksanaan sendiri seperti misalnya menciptakan bentuk operasi yang berbeda-beda; merencanakan produksi, suplai dan pemasarannya sendiri; mengelola dana sendiri; menunjuk, menggeser, mempekerjakan atau memilih pegawainya sesuai dengan peraturan pemerintah; memutuskan cara penggajian dan pemberian insentif; menentukan harga produk dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan lain-lain. Di lain pihak, status para pekerja, yang pada dasarnya juga pemilik perusahaan, harus dijamin oleh peraturan perusahaan, dan penampilan kerja harus selalu disesuaikan dengan insentif.

Kedua, usaha pemerintah untuk menciptakan suatu sistem di mana hukum nilai diterapkan secara terbatas pada pengembangan komoditi dalam sistem perekonomian sosialis. Pemerintah mengakui bahwa di dalam sistem ini, negara melakukan suatu pengawasan yang sangat ketat dan kaku terhadap perusahaan-perusahaan, dan perencanaan perekonomian ditujukan justru untuk melawan hukum nilai, serta seluruh kegiatan perekonomian tergabung dalam rencana-rencana dan dilaksanakan oleh tertib administrasi tanpa memperhatikan segi-segi penting dalam hukum ekonomi dan kekuatan pasar. Akibatnya, rencana-rencana itu gagal untuk mencapai sasaran. Menurut keputusan di atas, produksi dan nilai tukar, sementara menjadi dasar kegiatan pasar, dibatasi untuk produksi-produksi tertentu, seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan usaha-usaha pelayanan termasuk bengkel-bengkel. Dari keputusan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Cina mulai memberikan kelonggaran dan kebebasan kepada perusahaan-perusahaan untuk menentukan kebijakan mereka sendiri, dan mulai memperhatikan hukum nilai dan hukum ekonomi.

Hal itu tampak pula pada catatan *ketiga*, yaitu usaha Pemerintah Cina dalam menentukan sistem harga. Dewasa ini pemerintah mengakui bahwa sistem harga adalah cara yang paling efektif dan merupakan kekuatan perusahaan-perusahaan untuk tumbuh dan berkembang.²⁴ Di samping itu mereka juga mengakui bahwa penyesuaian harga adalah penting untuk menjawab dengan cepat bila terjadi perubahan penawaran dan permintaan pasar. Konsekuensinya harga kebanyakan barang kebutuhan di Cina agak naik karena selama ini hampir semua barang mendapat subsidi negara.

²⁴Robert Maxwell (ed.), *Deng's Speeches and Writing* (Oxford, Pergamon Press, Ltd., 1984), hal. 45.

Untuk menunjang usaha-usaha perbaikan perekonomian itu Pemerintah Cina sejak Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral Kongres PKC XI telah merintis kebijakan "pintu terbuka" dalam menarik modal asing dan teknologi dari negara-negara lain, dan memperluas perdagangan luar negeri guna meningkatkan devisa negara. Sebenarnya kebijakan ini dilontarkan beberapa bulan setelah Deng Xiaoping menyatakan pentingnya kebijakan pintu terbuka untuk pembangunan perekonomian Cina pada pembukaan Konferensi Ilmu Pengetahuan Nasional tanggal 18 Maret 1978,²⁵ dan diulangnya pada pembukaan Sidang Pleno Komite Sentral III itu. Memang baik sebelum maupun sesudah sidang itu, mulai meningkat kunjungan pejabat tinggi asing terutama dari Amerika Serikat, Jepang dan Eropa Barat. Bahkan pada tanggal 12 Agustus 1978 Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan antara Cina dan Jepang ditandatangani. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1979 hubungan diplomatik antara Cina dan Amerika Serikat dibuka secara resmi. Demikian pula dewasa ini terdapat sekitar 15.000 mahasiswa dan cendekiawan Cina belajar dan tinggal di Amerika Serikat dan beberapa ribu di Jepang dan Eropa Barat.²⁶

Di samping itu Pemerintah Cina pada awal tahun 1984 mulai menganut apa yang disebut *satu negara dua sistem* yaitu di bawah kedaulatan sistem sosialis, sistem kapitalis diijinkan hidup. Pernyataan mengenai hal ini sebelumnya memang sudah sering dilontarkan baik oleh Deng maupun Zhao Ziyang. Banyak pengamat memperkirakan bahwa pernyataan itu hanya dimaksudkan untuk penyatuan kembali Hong Kong, Makao dan Taiwan. Tetapi dengan diputuskannya 14 kota yang terletak di sepanjang pantai timur pada awal bulan April 1984 sebagai daerah-daerah administrasi khusus yang boleh menentukan peraturan yang berbeda untuk merangsang modal asing,²⁷ maka sasaran satu negara dua sistem itu bukan melulu untuk penyatuan kembali ketiga wilayah tersebut, melainkan juga untuk menarik sebanyak mungkin modal dan dana dari negara-negara lain yang penting artinya untuk kelancaran pembangunan.

Tampaknya usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Cina itu mengundang sikap pro dan kontra terutama di kalangan anggota PKC yang beranggotakan sekitar 40 juta orang itu dan TPR. Mereka yang kontra itu sebenarnya tidak kontra pada pembaruan, tetapi mereka tidak setuju dengan cara-cara pembaruan yang dianggap oleh mereka telah menyimpang dari empat prinsip utama yang telah disepakati bersama. Kelompok ini ternyata masih cukup besar pengikutnya. Hal itu terungkap dengan jatuhnya Hu

²⁵Dasar kebijaksanaan ini terdapat dalam Konstitusi Cina tahun 1982 Pasal 11. Mengenai hal ini lihat Chu-yuan Cheng, "Economic Reform in Mainland China," hal. 29-33.

²⁶*Ibid.*, hal. 34, dan John Bryan Starr, "Sino-American Relations: Policies in Tandem," *Current History* (September, 1986): hal. 242.

²⁷*Merdeka*, 4 April 1984.

Yaobang yang sebelumnya dianggap orang sebagai tokoh kuat pendukung Deng Xiaoping sekaligus sebagai calon utama penerus usahanya di masa mendatang bila Deng tiada. Namun disepakatinya Zhao Ziyang untuk menggantikan Hu sebagai Ketua Partai mengungkapkan bahwa kelompok yang kontra itu tidak sepenuhnya menentang usaha-usaha yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Cina (kelompok moderat).

Melihat perkembangan sejarah Cina sejak tahun 1949, sulit kiranya memperkirakan prospek pembaruan yang sekarang digalakkan itu. Tetapi dampak yang terjadi seperti meningkatnya taraf hidup rakyat di desa-desa (petani), desentralisasi keputusan dan sistem insentif yang berhasil meningkatkan output perusahaan, meningkatnya arus informasi dari luar akibat kebijakan pintu terbuka dan lain-lain, agaknya tetap akan mendorong pembaruan tersebut. Deng Xiaoping pada bulan Desember 1984 pernah mengatakan bahwa teori Marx yang dibuat 100 tahun yang lalu tidak dapat memecahkan semua permasalahan yang dihadapi rakyat Cina sekarang ini.²⁸ Hal itu dapat diartikan bahwa rakyat Cina tidak harus tergantung sepenuhnya pada Marxisme.

Tetapi peristiwa jatuhnya Hu Yaobang itu mengungkapkan bahwa rezim Beijing atau khususnya PKC tidak menghendaki pembangunan nasional Cina lepas dari kendalinya. Mereka lebih suka menunda pembangunan daripada melihat kekuasaan partai semakin terongrong. Jadi apa yang akan terjadi di Cina pada akhir abad ini, kiranya tetap akan dalam lingkup kendali Partai Komunis Cina meskipun di sana-sini terjadi penyesuaian-penyesuaian mengingat tidak akan terdapat lagi pemimpin seperti Mao Zedong atau Deng Xiaoping. Yang akan terjadi adalah keputusan kolektif atau kepemimpinan kolektif. Di samping itu penyesuaian juga terjadi karena meningkatnya kesalingtergantungan antara faktor intern dan ekstern. Hal ini tidak saja terjadi di Cina, tetapi juga di negara sosialis lainnya.

²⁸Chang Cheng-pang, "On the Four Cardinal Principles," *Issues & Studies* (Februari 1987): hal. 6.